



MEMBANGUN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS: STRATEGI EFEKTIF DALAM PENGELOLAAN DANA BOS UNTUK PENDIDIKAN BERKUALITAS

Yulia Andrawati

Universitas Negeri Semarang

Qurota A'yunina

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah

Korespondensi penulis: anyulia8@gmail.com¹, qurotanina16@gmail.com²

Abstract. *Transparent and accountable management of School Operational Assistance (BOS) funds is an important foundation in realizing quality education. This study aims to identify effective strategies in building transparency and accountability in the management of BOS funds in educational units. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, documentation studies, and observations in several elementary and secondary schools in Indonesia. The results of the study indicate that stakeholder involvement, application of good governance principles, basic accounting training for fund managers, and the use of a digital-based reporting system are key strategies that can improve the quality of BOS fund management. In addition, strengthening the capacity of school principals and treasurers in public accounting and supervision from the community also strengthen transparency and accountability. The implications of these findings point to the importance of synergy between education policies, school financial management, and public participation to support equity and improve the quality of education.*

Keywords: *Transparency, Accountability, BOS Funds, Quality Education, Management Strategy*

Abstrak. Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang transparan dan akuntabel merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi efektif dalam membangun transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di satuan pendidikan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi pada beberapa sekolah dasar dan menengah di wilayah Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan, penerapan prinsip good governance, pelatihan akuntansi dasar bagi pengelola dana, serta penggunaan sistem pelaporan berbasis digital, merupakan strategi kunci yang mampu meningkatkan kualitas pengelolaan dana BOS. Selain itu, penguatan kapasitas kepala sekolah dan bendahara dalam akuntansi publik serta pengawasan dari masyarakat turut memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Implikasi dari temuan ini mengarah pada pentingnya sinergi antara kebijakan pendidikan, manajemen keuangan sekolah, dan partisipasi publik untuk mendukung pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan.

Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Dana BOS, Pendidikan Berkualitas, Strategi Pengelolaan

LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan sebuah fondasi untuk membangun sumber daya manusia yang memiliki kualitas tinggi. Namun, kualitas tersebut tidak dapat ditingkatkan tanpa adanya sumber daya keuangan yang mencukupi (Hutabarat et al., 2024). UU No 20 tahun 2003 pasal 47 ayat (2) menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menyediakan anggaran pendidikan, di mana sumber pendanaan pendidikan tersebut ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Salah satu pembiayaan yang dimaksud adalah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS merupakan sebuah

program pemerintah untuk pendanaan biaya non personalia di sekolah yang meliputi biaya bahan atau peralatan dan biaya tidak langsung selama operasional sekolah (Mogot, 2023)

Pengelolaan dana yang efektif dapat tercapai apabila penggunaan dana diarahkan pada kegiatan atau program yang memiliki tingkat kepentingan yang tinggi (Karimah & Ginanjar, 2024). Demi mengoptimalkan penggunaan dana yang diberikan perlu dilakukan pengelolaan keuangan yang baik. Pengelolaan keuangan meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan, penggunaan, pencatatan, pelaporan hingga pertanggungjawaban untuk menunjukkan ketertiban administrasi keuangan sekolah (Nugraha et al., 2023). Namun, di dalam pelaksanaan masih banyak ditemukan permasalahan dalam proses pengelolaan dana BOS akibat dari tidak mengikuti prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi (Diantri et al., 2024)

Madrasah Ibtidaiyah (MI) merupakan jenjang pendidikan yang setara dengan Sekolah Dasar (SD). Landasan sosial yang dimiliki oleh lembaga madrasah menjadikannya tangguh dalam menghadapi persaingan global yang terjadi. Hal ini merupakan suatu nilai yang tinggi, namun tidak dapat menutupi bahwa upaya peningkatan mutu sekolah sangat sulit dilakukan terutama di sekolah swasta (Permadi, 2023) . Sehingga, pihak sekolah perlu menyusun strategi yang efektif dan efisien demi mengoptimalkan penggunaan dana BOS untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti langkah-langkah penerapan strategi pihak sekolah dengan melibatkan berbagai elemen demi mendukung peningkatan mutu pendidikan. Penelitian ini akan menggali lebih dalam terkait pengoptimalisasi pembiayaan pendidikan. Sehingga, pihak sekolah mampu menjaga kredibilitas sebagai madrasah yang memiliki manajemen keuangan yang kuat sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Yang dimana penelitian memiliki tujuan untuk mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, teks, dan bukan berbentuk angka (Prayoga, 2020). Penelitian ini dilakukan di MI Miftahul Huda Pangkalan yang berlokasi di Desa Pangkalan, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 59154. Informan utama adalah bendahara sekolah, data dikumpulkan melalui proses wawancara yang diselenggarakan melalui Zoom Meeting. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan proses analisis interaktif yang meliputi tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Adnyani & Astawa, 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan berdasarkan wawancara dengan bendahara MI Miftahul Huda Pangkalan, untuk dapat menggali strategi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS. Strategi yang efektif dapat ditemukan dengan meliputi perencanaan yang matang, pelibatan berbagai pemangku kepentingan, dan penggunaan sistem digital untuk mempermudah monitoring dan pelampiran. Hasil dari wawancara menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS di MI Miftahul Huda melibatkan berbagai pihak seperti guru, ketua yayasan, komite sekolah, dan juga wali murid, mereka dilibatkan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Dengan dilibatkannya dari berbagai pihak memiliki tujuan agar kebutuhan prioritas sekolah dapat diidentifikasi secara objektif dan lebih transparan.

Bendahara MI Miftahul Huda menegaskan bahwa “Dalam menyusun RKAS, kami selalu bermusyawarah terlebih dahulu dengan para pihak-pihak yang terkait. Dari setiap kebutuhan, baik untuk honor guru, pengembangan fasilitas di sekolah, maupun untuk pengadaan alat pembelajaran, kami diskusikan terlebih dahulu secara terbuka.” Hal tersebut juga sejalan dengan prinsip partisipatif dalam pengelolaan dana BOS dengan kesesuaian aturan dalam Pedoman Umum BOS oleh Kemdikbud. Selain itu, ketentuan dalam permendikbud Nomer 63 Tahun 2023 mengenai petunjuk Teknis (Juknis) terhadap Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang SD, SMP, sampai SMA, dana BOS digunakan untuk mendukung berbagai aspek operasional pendidikan yang terdapat di sekolah antara lain seperti: (1) Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), (2) Pengembangan Perpustakaan Sekolah, (3) Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler, (4) Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran, (5) Administrasi Sekolah, (6) Pengembangan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan, (7) Pembayaran Layanan Daya dan Jasa, (8) Pemeliharaan Fasilitas dan Infrastruktur Sekolah, (9) Penyediaan Alat Media Pembelajaran, (10) Peningkatan Kompetensi Keahlian, (11) Dukungan Terhadap Keterserapan Lulusan, (12) Pembayaran Honorarium.

Dengan adanya penyesuaian alokasi dana juga dilakukannya secara fleksibel dengan mengikuti perubahan kebijakan dari pusat dan juga jumlah peserta didik. Jika terdapat penurunan jumlah siswa, maka untuk honor para guru pun harus disesuaikan juga agar tidak terjadi defisit terhadap anggaran. “Misalnya seperti, honor per jamnya kami turunkan agar tidak terjadi minus didalam anggarannya,” berikut tambahan dari bendahara MI Miftahul Huda.

Transparansi menjadi salah satu pilar utama dalam pengelolaan dana BOS di sekolah MI Miftahul Huda. Setiap terdapat pengeluaran akan didokumentasikan dengan rapi, dan juga untuk seluruh bukti transaksi akan diarsipkan untuk keperluan pelaporan ataupun untuk klarifikasi jika terdapat pertanyaan-pertanyaan dari para masyarakat atau dari pihak-pihak yang terkait.

Meskipun laporan keuangan belum dipublikasikan secara luas kepada publik, namun MI Miftahul Huda siap untuk memberikan akses kepada siapapun yang membutuhkan informasi terkait penggunaan dana BOS. “semua nota dikumpulkan, kemudian difoto lalu diunggah ke dalam aplikasi pelaporan online setiap triwulannya. Jika ada masyarakat yang bertanya, kami siap untuk menunjukkan bukti-buktinya yang ada,” penjelasan dari bendahara MI Miftahul Huda. Hal tersebut mencerminkan semangat transparansi yang sesuai dengan anjuran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2023). Selain pelaporan kepada pemerintah pusat, laporan keuangan juga akan disampaikan kepada pihak yayasan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban secara internal. Yayasan Al-Ittihadul Muwahiddin yayasan yang menaungi MI Miftahul Huda, secara rutin akan menerima laporan keluar masuk atas dana yang digunakan untuk dapat memastikan bahwa tidak terjadi penyimpangan.

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS diwujudkan melalui pelaporan pertanggungjawaban (LPJ) yang disusun secara triwulan dan akan diaudit oleh para pengawas tingkat kecamatan. Pengawasan eksternal dari dinas pendidikan sangat jarang dilakukan, terutama untuk madrasah-madrasah swasta yang kecil, sehingga pengawasan dari internal menjadi sangat penting. Dengan itu, secara rutin yang mengevaluasi atas penggunaan dana terdiri dari kepala sekolah, bendahara, komite sekolah, dan yayasan. Ungkap dari bendahara MI Miftahul Huda bahwa “Honor guru dan tenaga kependidikan tidak boleh melebihi 40% dari total dana BOS yang didapatkan. Semua atas pengeluaran, yang termasuk honor panitia ujian dan pembimbing ekstrakurikuler, harus mengikuti peraturan yang ada” karena jika terjadi kekurangan atau ketidaksesuaian dalam laporan, maka pihak sekolah akan segera melakukan klarifikasi dan juga perbaikan.

Pengelolaan dana BOS di MI Miftahul Huda juga mendapati beberapa kendala, baik secara teknis maupun non teknis. Salah satu masalah yang utama yaitu keterlambatan pencairan dana, yang mengakibatkan berdampak langsung pada pembayaran honor guru dan juga untuk biaya operasional sekolah. “seringkali dana BOS terlambat cair. Kalau dana BOS belum cair, maka guru-guru harus bersabar karena untuk pembayaran honor belum bisa dilakukan.” Selain itu, untuk kendala teknis seperti lambatnya server aplikasi pelaporan juga sering menjadi penghambat atas prosesnya pelaporan keuangan sekolah. Namun, dari pemerintah pusat memahami atas kendala tersebut dan tidak ada pemberian sanksi atas keterlambatan pelaporan akibat masalah teknis.

Kemudian keterbatasan dana juga menjadi sebuah tantangan bagi mereka, terutama ketika kebutuhan sekolah melebihi alokasi dari dana BOS yang didapatkan. Dalam situasi seperti ini, sekolah menanganinya dengan cara mengadakan musyawarah dengan para wali murid untuk

mencari solusi bersama sama, seperti mencari dana tambahan dari yayasan atau bahkan mendapatkan sumbangan sukarela dari para masyarakat ataupun wali murid.

Pengelolaan dana BOS yang akuntabel dan transparan akan memberikan dampak yang positif bagi peningkatan mutu pendidikan di MI Miftahul Huda. Dana BOS digunakan sebagaimana untuk pengadaan sarana pembelajaran seperti proyektor, laptop, dan juga untuk mendukung pelatihan para guru-guru guna menunjang implementasi di kurikulum merdeka. “Dana BOS kami gunakan untuk membeli proyektor, laptop, dan mendanai pelatihan para guru, baik secara daring maupun yang luring.” Hal tersebut mendukung hasil penelitian dari (Nuriyawati & Ghufroon Abdullah, 2025) yang menyatakan bahwa dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dari masyarakat dalam pengelolaan dana BOS dapat secara signifikan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Berdasarkan dari temuan penelitian tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektifitas atas pengelolaan dana BOS, antara lain: (1) Pemerintah perlu untuk memperkuat sistem pengawasan, khususnya di sekolah-sekolah kecil, agar penggunaan dana BOS lebih optimal dan tepat sasaran, (2) Proses pencairan dana BOS perlu dipercepat agar tidak mengganggu kelancaran operasional sekolah, (3) Sekolah didorong untuk lebih produktif dalam mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, (4) Diharapkan pihak pemerintah dapat meningkatkan jumlah Dana Bos agar sekolah dapat memenuhi kebutuhan operasional dan pengembangan secara lebih maksimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi untuk membangun transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di MI Miftahul Huda telah berjalan cukup baik, telah melalui pelibatan berbagai pihak, pelaporan berkala setiap triwulan, dan sudah dilakukannya audit secara internal. Namun, masih terdapat tantangan yang signifikan, seperti keterlambatan atas pencairan dana dan minimnya terhadap pengawasan eksternal. Keterbukaan dalam pelaporan keuangan, baik kepada yayasan maupun kepada masyarakat, menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan dan memastikan atas penggunaan dana BOS yang benar-benar mendukung untuk mutu pendidikan.

Secara keseluruhan, untuk pengelolaan dana BOS di MI Miftahul Huda dapat menjadi salah satu contoh praktik yang baik dan dapat diadopsi oleh sekolah lain, terutama dalam hal keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas. Namun, dukungan dari para pemerintah dalam hal pengawasan dan penambahan alokasi dana akan tetap sangat dibutuhkan untuk dapat memastikan pendidikan yang berkualitas dapat terwujud di seluruh satuan pendidikan.

DAFTAR REFERENSI

- Adnyani, K. Y., & Astawa, I. G. P. B. (2023). *Analisis Penggunaan Sistem Aplikasi Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (ARKAS) Terhadap Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar Di Kabupaten Buleleng* Kadek Yudi Adnyani *, I Gede Putu Banu Astawa. 13(3), 359–367.
- Diantri, S., Bani, M., Fatiqh, S., & Trihantoyo, S. (2024). *Pengoperasian Aplikasi RKAS Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)* Shevia Dwi Diantari Universitas Negeri Surabaya Malista Sint Oida Bani Universitas Negeri Surabaya Sonata Al Fatiqh Universitas Negeri Surabaya Syunu Trihantoyo. 1(2), 280–299.
- Hutabarat, H., Tampubolon, T. M., Banjarnahor, R., Sihotang, R., Kristen, M. P., Agama, I., Negeri, K., Kristen, M. P., Agama, I., Negeri, K., Kristen, M. P., Agama, I., Negeri, K., Kristen, M. P., Agama, I., & Negeri, K. (2024). *Analisis Sumber Dana Pendidikan SMK Swasta St Nahanson Parapat Sipoholon*. 1(1), 63–71.
- Karimah, A., & Ginanjar, W. (2024). *Optimalisasi pengelolaan dana bos untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah aliyah 1*. 1(1).
- Mogot, T. (2023). *ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SEKOLAH MENENGAH ATAS*. 3(2), 617–624.
- Nugraha, A., Hairani, N. K., Prisila, R., & Sekolah, B. O. (2023). *Strategi pengelola dana bos dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia yang berkualitas*. 3(2), 75–80.
- Nuriyawati, Maryanto, and Ghufon Abdullah. 2025. “PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA BOS TERHADAP MUTU PENDIDIKAN.” 5(1):1–9.
- Permadi, R. (2023). *Mutu layanan pendidikan madrasah tsanawiyah nahdhatul ulama ogan komering ulu timur*. 02(03), 841–849.
- Prayoga, A. (2020). *KARAKTERISTIK PROGRAM KURIKULUM PONDOK PESANTREN*. 2(1), 77–86.
- Prayoga, Ari. 2020. “KARAKTERISTIK PROGRAM KURIKULUM PONDOK PESANTREN.” 2(1):77–86.